

ANALISIS KEMANDIRIAN DAN KEMAMPUAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN GOWA

Nurul Istiqamah Akhmad¹, Basri Bado², Syamsu Alam³
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Makassar
Gunung Sari, Makassar, Sulawesi Selatan
E-mail istiqamahanwar.10@gmail.com

Abstract: Analysis of the ability and Independence of the Regional Financial Performance of Gowa Regency. This study aims to analyze the independence and ability of regional financial performance in Gowa Regency. By using the ratio analysis period of 2010-2018 and the difference test of two paired samples in 2013-2015 and in 2016-2018. The financial performance results of the Gowa Regency government during the period 2010-2018 using the independence ratio analysis tool included in the category of very poor and instructive relationship patterns, ability ratios included in the category of very low and low, effectiveness ratios from 2010-2018 tended to be effective and efficiency ratios from 2010-2018 tends to be efficient. The results of the two paired samples in 2013-2015 were different during the reign of Ichsan Yasin Limpo and during the administration of Adnan Purichta Ichsan 2016-2018 showed that the transfer funds differed significantly while the PAD did not differ significantly.

Keywords: *Local Financial Performance, Locally- Generated revenue, Ratio Of Fiscal Desentralization, Ratio of Independence Regional Finance, Ratio Analysis of the effectiveness of regions financial, Ratio Analysis of the efficient of regions financial.*

Abstrak: Analisis Kemandirian Dan Kemampuan Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian dan kemampuan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gowa. Dengan menggunakan analisis rasio periode tahun 2010-2018 dan uji beda dua sampel berpasangan tahun 2013-2015 dan tahun 2016-2018. Hasil kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa selama periode 2010-2018 dengan menggunakan alat analisis rasio kemandirian termasuk dalam kategori kurang sekali dan pola hubungan instruktif, rasio kemampuan termasuk dalam kategori sangat rendah dan rendah, rasio efektivitas dari tahun 2010-2018 cenderung efektif dan rasio efesiensi dari tahun 2010-2018 cenderung efisien. Hasil uji beda dua sampel berpasangan tahun 2013-2015 pada masa pemerintahan Ichsan Yasin Limpo dan pada masa pemerintahan Adnan Purichta Ichsan 2016-2018 memperlihatkan jika dana transfer berbeda secara signifikansi sedangkan PAD tidak berbeda secara signifikansi.

Kata Kunci: *Rasio Kinerja Keuangan Daerah, rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efesiensi.*

PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan pemerintah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi membuat setiap pemerintah daerah diseluruh Indonesia harus siap untuk menerima kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah. Pemerintah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Halim (2012) Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* di bidang keuangan.

Faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Daerah yang mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil.

Kemandirian keuangan dimaksudkan adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan (mendana) segala aktivitasnya, oleh karena itu kreatifitas dan inisiatif daerah dalam menggali sumber- sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan otonomi daerah sendiri. Kewenangan yang lebih luas memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan

dan mengoptimalkan potensi lokalnya sehingga kemampuan keuangan daerah dapat lebih baik, daerah menjadi lebih mandiri dan ketergantungan pada pemerintah pusat akan semakin kecil (Mahmudi, 2010).

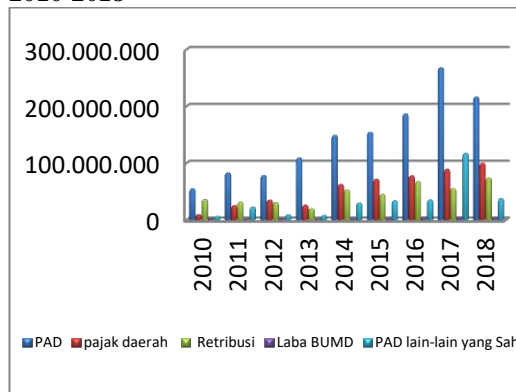
Otonomi daerah merupakan proses penerapan desentralisasi fiskal dalam memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti pelaksanaan otonomi daerah harus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, agar pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pelaksanaan otonominya. Menurut Sedamayanti (2003) juga menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PAD merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lainnya yang sah. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Kabupaten Gowa adalah salah satu di antara semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerahnya. Untuk dapat melihat perkembangan dan besarnya kontribusi PAD terhadap total

penerimaan anggaran Kabupaten Gowa dari tahun 2010 sampai hingga tahun 2018, dapat dilihat pada grafik 1.1 sebagai berikut ini :

Grafik 1. Perkembangan PAD dan Komponen PAD Kabupaten Gowa Tahun 2010-2018



Sumber : BPD Kabupaten Gowa Tahun 2019

Pada grafik 1.1 dapat dicermati bahwa PAD Kabupaten Gowa pada tahun 2010 sampai hingga tahun 2018 mengalami trend perkembangan positif atau peningkatan pada setiap tahunnya kecuali pada tahun 2012 dan tahun 2018 mengalami penurunan, namun penurunannya pada tahun 2012 tidak terlalu signifikan dibanding dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2018. Penurunan ini disebabkan karena rendahnya kontribusi dari komponen-komponen PAD dalam meningkatkan PAD.

Komponen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik ditingkat provinsi, kota, dan kabupaten adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari dana perimbangan. DAU dan DAK merupakan salah satu sumber penerimaan dalam APBD yang turut memberikan kontribusi terhadap pengelolaan anggaran di daerah, sehingga pemanfaatan harus sesuai dengan fungsinya.

Secara teoritis dan konseptual, perlunya dilakukan pelimpahan

wewenang karena akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Selanjutnya desentralisasi fiskal akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintah (daerah) akan lebih efisien untuk kegiatan produksi dan penyediaan barang publik.

Kemandirian keuangan suatu daerah bisa diwujudkan dengan peningkatan pertumbuhan PAD dan merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007).

METODE

Penelitian ini Kabupaten Gowa dengan menggunakan data sekunder dengan sampel data pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, anggaran PAD, dan realisasi belanja daerah di Kabupaten Gowa selama periode 2010 sampai hingga tahun 2018 yang diperoleh dari BPD

Kabupaten Gowa dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan uji beda dua sampel berpasangan pada masa pemerintahan Ichsan Yasin Limpo pada tahun 2013-2015 dan pada pemerintahan Adnan Purichta Ichsan tahun 2016-2018 serta menggunakan rasio keuangan yang terbagai atas :

a. Rasio Kemandirian Daerah

$$R.K = \frac{PAD}{Dana Transfer} \times 100\%$$

b. Rasio Desentralisasi Fiskal

$$R.D.F = \frac{PAD}{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

$$R.Efekt = \frac{Realisasi Penerimaan PAD}{Anggaran PAD} \times 100\%$$

d. Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

$$R.Efis = \frac{Realisasi Pengeluaran PAD}{Realisasi Penerimaan PAD} \times 100\%$$

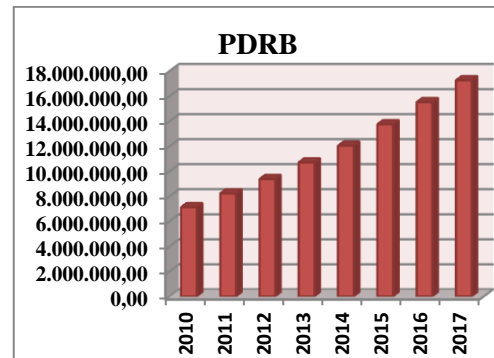
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Gowa

Untuk dapat melihat perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Gowa dengan menggunakan indikator PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya. yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga

sebaliknya. Perkembangan PDRB dapat dilihat pada grafik 4.3 :

Grafik 2. PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHB) Kabupaten Gowa Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2018

Berdasarkan pada Grafik 4.3 di atas dapat dicermati bahwa selama periode tahun 2010 sampai hingga tahun 2017 nilai PDRB atas dasar harga berlaku, memberikan informasi mengenai besaran PDRB di Kabupaten Gowa. Perkembangan PDRB Kabupaten Gowa dari tahun 2010 sampai hingga tahun 2017 mengalami tren positif atau mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dilihat dari rata-rata PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2010 sampai hingga tahun 2017 yaitu sebesar Rp 11.756.688,42.

PDRB Kabupaten Gowa dengan menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan dalam menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Gowa dari tahun 2010 sampai hingga tahun 2017 tetap menunjukkan peningkatan yang konsisten selama kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gowa telah mengolah sumber daya dan seluruh potensi yang dimiliki dengan efektif dan efisien. Hal ini juga akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

2. Analisis Uji Beda Dua Sampel Berpasangan

Berdasarkan dari hasil yang diperoleh dari pengolahan data

menggunakan uji beda dua sampel berpasangan, untuk mengetahui dampak dari kinerja keuangan daerah yang terjadi di Kabupaten Gowa. Maka dapat dianalisis dengan menggunakan variabel-variabel yang menjadi tolak ukur dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Uji Beda Dua Sampel Berpasangan

Indikator	Uji Beda Dua Sampel Berpasangan			
	Korelasi	Signifikan	T_{hitung}	T_{tabel}
PAD	0,920	$0,138 > 0,05$	2,410	4,302
Dana Transfer	0,333	$0,009 < 0,05$	10,630	4,302

Sumber: Data Sekunder, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1. dari hasil pengolahan data dapat diketahui jika terdapat beberapa variabel yang signifikansi serta $t_{hitung} > t_{tabel}$ di mana t_{tabel} sebesar 4,302 menunjukkan kinerja Keuangan daerah berbeda secara signifikansi atau dapat dikatakan terdapat pengaruh dari adanya kinerja keuangan daerah bagi variabel-variabel tersebut. Variabel-variabel tersebut antara lain : dana transfer ($\text{sig} = 0,009 < 0,05$) dengan t_{hitung} sebesar -10,630. Sedangkan variabel yang tidak berbeda secara signifikansi karena tingkat signifikansi yang lebih dari 0,05 dan

t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} dengan t_{tabel} sebesar 4,302 yaitu PAD ($\text{sig} = 0,138 > 0,05$) dengan t_{hitung} sebesar 2,410.

Dengan menggunakan uji beda dua sampel berpasangan maka dapat disimpulkan jika kinerja keuangan daerah terhadap dana transfer berbeda secara signifikansi atau terdapat pengaruh dari adanya kinerja keuangan daerah bagi kinerja ekonomi. Sedangkan PAD tidak berbeda secara signifikansi atau tidak terdapat pengaruh dari adanya kinerja keuangan daerah bagi kinerja ekonomi yang tercakup dalam variabel yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.

3. Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa

a. Rasio Kemandirian

Kemandirian daerah ditujukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misal bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan besarnya realisasi PAD dengan membandingkan penerimaan transfer dari pusat dan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2010-2018

Tahun	PAD (Rp 000)	Dana transfer (Rp 000)	Kemandirian Keuangan (%)	Keterangan	Pola Hubungan
2010	55.440.280	652.168.752	8,50	Rendah Sekali	Instruktif
2011	83.221.491	734.380.975	11,33	Rendah Sekali	Instruktif
2012	78.700.219	681.321.000	11,55	Rendah Sekali	Instruktif
2013	109.772.063	768.810.945	14,28	Rendah Sekali	Instruktif
2014	149.352.694	1.058.503.881	14,11	Rendah Sekali	Instruktif
2015	154.772.384	1.295.542.132	11,95	Rendah Sekali	Instruktif
2016	187.176.036	1.225.854.162	15,27	Rendah Sekali	Instruktif
2017	268.339.203	1.304.093.896	20,58	Rendah Sekali	Instruktif
2018	217.112.642	1.477.952.776	14,70	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 (Data diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 2. dapat dicermati bahwa untuk rasio kemandirian dari tahun 2010 sampai hingga tahun 2018 pada daerah Kabupaten Gowa, pada tahun 2010 sampai hingga tahun 2018 rasio kemandirian di daerah Kabupaten

b. Rasio Desentralisasi Fiskal
Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD. Untuk

Tabel 3. Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Gowa 2010-2018

Tahun	PAD (Rp 000)	TPD (Rp 000)	Kemampuan Keuangan (%)	Keterangan
2010	55.440.280	727.191.676	7,62	Sangat Rendah
2011	83.221.491	847.165.005	9,82	Sangat Rendah
2012	78.700.219	921.069.186	8,54	Sangat Rendah
2013	109.772.063	1.085.481.894	10,11	Rendah
2014	149.352.694	1.240.560.247	12,04	Rendah
2015	154.772.384	1.450.811.765	10,67	Rendah
2016	187.176.036	1.612.246.983	11,61	Rendah
2017	268.339.203	1.790.263.499	14,99	Rendah
2018	217.112.642	1.781.396.471	12,18	Rendah

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 (Data diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 3. di atas dapat dicermati bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Gowa selama periode tahun 2010 sampai hingga tahun 2018 dengan menggunakan alat analisis derajat desentralisasi fiskal, pada tahun 2010 sampai hingga tahun 2012 masih berada di bawah angka 0,00-10,00 % atau selama periode 2010-2012 berkategori sangat rendah. Pada tahun 2013 sampai hingga tahun 2018 masih berada antara 10,00-20,00% sehingga berkategori rendah.

Gowa masih termasuk dalam kategori kurang sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif karena berada di antara 0 % dan 25 %. Artinya peran pemerintah pusat lebih dominan daripada peran pemerintah daerah.

dapat melihat rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Gowa dari tahun 2010 sampai hingga tahun 2018 dan dapat dilihat pada Tabel 3.

c. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gowa dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100 %. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Rasio efektivitas ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Gowa 2010-2018

Tahun	Realisasi PAD (Rp 000)	Anggaran PAD (Rp 000)	Efektivitas (%)	Kriteria
2010	55.440.280	44.413.644	124,83	Efektif
2011	83.221.491	73.771.176	112,81	Efektif
2012	78.700.219	72.001.402	109,30	Efektif
2013	109.772.063	119.606.386	91,77	Tidak Efektif
2014	149.352.694	132.991.839	112,30	Efektif
2015	154.772.384	147.283.776	105,08	Efektif
2016	187.176.036	268.339.203	69,75	Tidak Efektif
2017	268.339.203	250.897.134	106,95	Efektif
2018	217.112.642	208.160.896	104,30	Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 (Data diolah, 2019)

Berdasarkan dari tabel 4. dapat dicermati bahwa rasio efektivitas atas pendapatan daerah untuk tahun 2010 sampai hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Rasio efektivitas di Kabupaten Gowa, pada tahun 2011-2012 termasuk dalam kategori efektif. Untuk tahun 2013 dan tahun 2016 rasio efektivitas termasuk dalam kategori tidak efektif yang mengakibatkan penurunan pada sektor pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan pada tahun 2014-2015 serta pada tahun 2017 dan tahun 2018 rasio efektivitas keuangan daerah termasuk dalam kategori efektif.

Akan tetapi pada tahun 2010 rasio efektivitas yang paling dominan

mengalami kenaikan pada pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sehingga hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah menjadi 124,83% yang masuk pada kategori yang sangat efektif dan merupakan rasio efektivitas yang paling tertinggi pada tahun 2010-2018.

d. Rasio Efisiensi

Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari 100 %. Apabila semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini pengukuran efisien dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Gowa 2010-2018

Tahun	Realisasi BD (Rp 000)	Realisasi PD (Rp 000)	Efisien (%)	Kriteria
2010	761.474.910	726.563.085	104,81	Tidak efisien
2011	809.669.598	845.180.172	95,80	Efisien
2012	853.559.473	921.069.186	92,67	Efisien
2013	1.057.021.023	1.085.481.894	97,38	Efisien
2014	1.275.837.753	1.295.875.178	98,45	Efisien
2015	1.435.552.583	1.472.120.934	97,52	Efisien
2016	1.602.546.758	1.610.421.215	99,51	Efisien
2017	1.617.834.431	1.559.318.433	103,75	Tidak efisien
2018	1.707.173.394	1.781.396.471	95,83	Efisien

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 (Data diolah, 2019)

Dapat dilihat dari Tabel 5. dapat dicermati bahwa untuk belanja pemerintah daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2010 dan 2017 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya diatas 100% yaitu sebesar 104,81% yang dimana total belanja daerahnya melebihi dari pencapaian penerimaan daerah setiap tahunnya dan pada tahun 2011-2016 tergolong efisien karena nilai rasionya berada dibawah 100% hal ini diakibatkan selisih pendapatan lebih besar dari realisasi belanja daerah. Dan pada tahun 2018 rasio efisiensi berada dalam kategori efisien karena nilainya $95,83 \% < 100 \%$.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa :

- a. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemandirian yang sangat rendah pada tahun 2010-2018, kemudian untuk tingkat rasio desentralisasi fiskal masuk dalam kategori yang sangat rendah pada tahun 2010-2012 dan pada tahun 2013-2018 yang dikategorikan rendah. Namun, efektifitas penerimaan PAD di Kabupaten Gowa dari tahun 2010-2018, hanya pada tahun 2013 dan 2016 rasio efektivitas di bawah 100 %.
- b. Hasil pengujian dengan menggunakan uji beda dua sampel berpasangan memperlihatkan jika dana transfer berbeda secara signifikansi sedangkan PAD tidak berbeda secara signifikansi dari kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Saran

- a. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Gowa harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan PAD serta potensi-potensi yang ada di daerah Kabupaten gowa yang mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar, potensi tersebut antara lain : dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan potensi-potensi lainnya Peningkatan PAD baik secara intensifikan maupun secara ekstensifikasi. Kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih teliti lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2018*.
- _____. (2018). *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2017*.
- _____. (2018). *Statistik Keuangan Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan 2016/2017*.

- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. Abdul dan Theresia (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Sedamayanti, (2003). *Good Governanace (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturasi dan pemverdayaan*. Mandar Maju. Bandung.